

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan Poros Desa di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Fauzi Budi Setiawan¹

Diterima : 05 Juni 2012

Disetujui : 11 Juli 2012

ABSTRACT

Participatory regional development strategy in Kabupaten Gresik emphasizes on infrastructure development through the Bantuan Keuangan Pembangunan Jalan Poros Desa (Village Axis Road Development Finance Aid). The study area is Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. The study aims to investigate the different form and level of community participation in the project differentiated by the distance of the project from the settlements in each village. The study applied post-positivist rationalistic approach using descriptive quantitative method of research. Conclusion is drawn deductively by means of theoretical review to answer the research question: how is the form and level of participation in the Village Axis Road Development project in Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik? The study analyzes participatory form and level, and also location influence on the form and level of participation in the community, within the categories of villages. Analysis confirmed a differentiation in the form and level of participation between the two categories of villages. In the first category villages, full control participation form was observed with high level of participation, meanwhile in the second category villages shared control participation form was observed, with medium level of participation.

Key words : community participation, village axis road development

ABSTRAK

Strategi pembangunan wilayah partisipatif di Kabupaten Gresik menitikberatkan pada pembangunan prasarana jalan melalui program Bantuan Keuangan Pembangunan Jalan Poros Desa. Cakupan wilayah studi ini meliputi Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian adalah mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Jalan Poros Desa yang dibedakan oleh jarak kegiatan dari permukiman di tiap desa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan postpositivistik rasionalistik dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Proses penelitian secara deduktif, dengan menggunakan konsep atau kajian teori sehingga muncul pertanyaan penelitian: bagaimana partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Jalan Poros Desa di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik? Studi ini menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi, serta pengaruh lokasi terhadap bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat yang dilakukan pada kedua kategori desa tersebut. Hasil analisa yang dilaksanakan menunjukkan adanya perbedaan bentuk dan tingkat partisipasi antara kedua kategori desa. Pada desa kategori pertama terdapat bentuk partisipasi pengendalian penuh (Full Control) dengan tingkat partisipasi tinggi dan pada desa kategori kedua teramati bentuk partisipasi pengendalian terbagi (Shared Control) dengan tingkat partisipasi sedang.

Kata kunci : partisipasi masyarakat, pembangunan jalan poros desa

¹ Administrasi Pembangunan, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Kontak Penulis : fauzibudisetiawan@rocketmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan Jalan Poros Desa merupakan Kegiatan Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Gresik yang dikhususkan dalam penanganan pembangunan jalan yang menghubungkan antar desa di wilayah Kabupaten Gresik secara swakelola. Jalan Poros Desa merupakan pembangunan Jalan Lokal Sekunder I dan berdasarkan SNI 03-6967-2003 tentang Persyaratan Umum Sistem Jaringan dan Geometrik adalah jalan poros perumahan yang menghubungkan antara jalan kolektor dan atau pusat aktivitas di perumahan. Jalan ini secara fungsional dapat dikatakan seperti jalan dengan hirarki arteri di dalam kawasan perumahan, dengan kapasitas jalan yang dapat melayani jumlah kendaraan yang relatif besar, yaitu antara 800-2000 kendaraan/hari.

Kecamatan Panceng merupakan kecamatan di Kabupaten Gresik yang terletak di bagian paling barat dan berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, di Kecamatan ini banyak berkembang kawasan pertanian dan wisata yang harus diimbangi dengan ketersediaan prasarana, salah satunya adalah prasarana Jalan Poros Desa. Tahun 2010 di Kecamatan Panceng mendapatkan Bantuan Keuangan Pembangunan Jalan Poros Desa yang diberikan pada lima desa yakni Desa Siwalan, Dalegan, Ketanen, Sukodono, dan Wotan. Bantuan Keuangan Pembangunan Jalan Poros Desa yang mereka peroleh dikelola dengan melibatkan swadaya masyarakat, baik tenaga maupun material. Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan cara berbeda-beda ada yang dikerjakan secara gotong royong, ada yang dikerjakan dengan mendatangkan tukang/tenaga ahli, dan ada yang diserahkan pihak luar. Pada Kecamatan Panceng telah terjadi perbedaan hasil fisik dalam pembangunan Jalan Poros Desa, karena adanya perbedaan jarak lokasi tempat jalan tersebut dibangun dari pemukimannya, dan hal inilah yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian **“(Research Question)”** yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : *Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan Poros Desa di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?* Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada pembangunan Jalan Poros Desa di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

METODE PENELITIAN

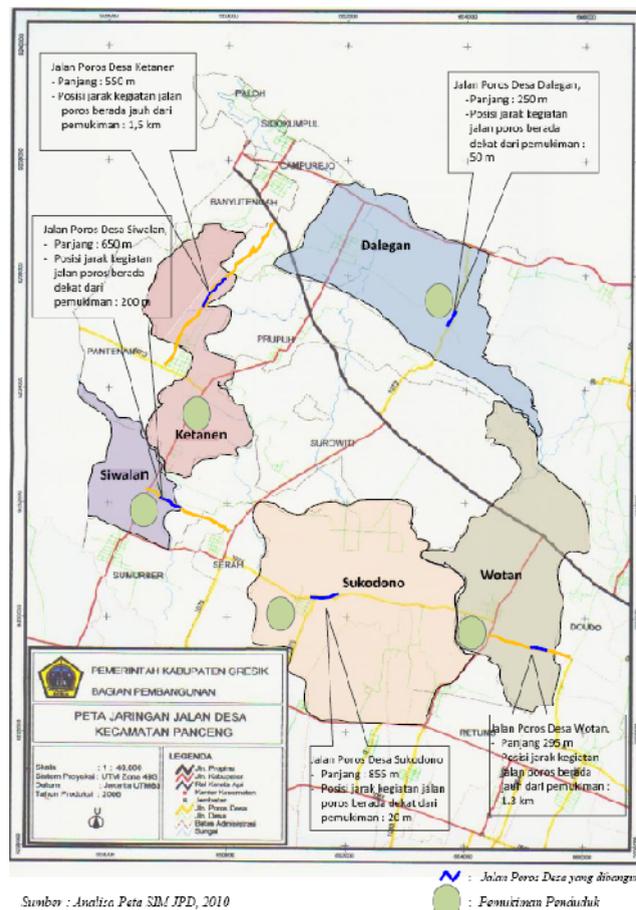
Penelitian ini berlandaskan pada paradigma kuantitatif dengan pendekatan postpositivistik rasionalistik. Metode penelitian dalam penelitian ini berangkat dari teori lalu timbul dugaan yang selanjutnya diuji melalui data di lapangan. Data lapangan dikumpulkan dan dianalisis secara kuantitatif menggunakan statistik diskriptif, sehingga bisa dibuktikan hasil dugaan tersebut benar atau salah. Berdasarkan masalah yang penulis ajukan, maka metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan peneliti karena akan banyak menggunakan data yang berbentuk angka, yang dimulai dari pengumpulan data, mengartikulasikan terhadap data itu dan hasilnya berbentuk tabel. Penelitian diskriptif dikarenakan dalam penelitian ini didukung dengan adanya variabel, dan variabel yang diteliti adalah sudah dan sedang terjadi. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan populasi masyarakat yang berada di desa-desa lokasi pelaksanaan pembangunan Jalan Poros Desa tahun 2010. Untuk memilih desa dan masyarakat yang nantinya akan ditetapkan menjadi sampel digunakan *Multistage Sampling*. Dalam pemilihan desa dan responden sebagai sampel, menggunakan teknik *Proposionate Purposive Simple Random Sampling*.

RUANG LINGKUP WILAYAH STUDI

Kecamatan Panceng merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gresik. Kecamatan ini terletak paling barat pada wilayah Gresik sehingga berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan. Sistem pelayanan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada kerangka Pembangunan Jangka Panjang dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) masuk dalam Satuan Wilayah Pembangunan I bersama dengan Kecamatan Dukun, Ujungpangkah, Sidayu, dan Bungah. Kegiatan utama antara lain : industri, pertanian tanaman pangan, pertambangan, perikanan, perumahan, dan pariwisata budaya.

Kondisi Jaringan Jalan Poros Desa di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Prasarana Jalan Poros Desa di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sepanjang 14,24 km, terdiri jalan paving stone 2,42 km kondisi baik dan 1,3 km kondisi jelek, jalan aspal 2,62 km, jalan telford/makadam 5,9 km, jalan tanah 2 km. Dari kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki beban membangun dalam kegiatan Bantuan Keuangan Jalan Poros Desa untuk peningkatan jalan dari kondisi tanah menjadi *macadam/telford* 2 km, kondisi *telford* ditingkatkan menjadi paving/aspal/cor beton sepanjang 5,9 km, dan belum lagi untuk menanganai jalan yang kondisinya rusak sepanjang 1,3 km.



Sumber : Analisa Peta SIM JPD, 2010

GAMBAR 1
PETA POSISI DESA-DESA YANG MENDAPATKAN BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN
JALAN POROS DESA DI KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010

KAJIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA DI KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil (Karianga, 2011:248). Untuk mengetahui partisipasi yang ada pada pembangunan jalan poros desa perlu dikaji menurut teori bentuk-bentuk partisipasi yang terjadi didalamnya. Adapun bentuk/jenis-jenis partisipasinya terbagi dalam tahapan perencanaan meliputi: (1) derajat kesukarelaan; (2) cara keterlibatan; (3) intensitas dan frekuensi dalam kegiatan; (4) efektifitas; (5) siapa saja yang terlibat; dan (6) gaya peran serta. Tahapan Pelaksanaan/pembangunan meliputi (1) pikiran; (2) tenaga; (3) bantuan barang; dan (4) bantuan dana. Sedangkan jenis partisipasi terdiri dari: pikiran (*psychological participation*), tenaga (*physical participation*), pikiran dan tenaga (*psychological dan physical participation*), keahlian (*participation with skill*), barang/material (*material participation*), uang (*money participation*). Sedangkan bentuk partisipasi tahap pemeliharaan dan pengelolaan terdiri : (1) Kehadiran dalam pertemuan; dan (2) Kesiediaan membayar iuran. Bentuk-bentuk partisipasi tersebut dianalisa dalam setiap tahapan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Penilaian masing-masing tahap dilakukan dengan tolak ukur indikator penilaian bentuk tingkatan Nabeel Hamdi terdiri dari : bentuk Tidak Langsung (*indirect*), Konsultatif (*consultative*), Pengendalian Terbagi (*shared control*), dan Pengendalian penuh (*full control*).

Tingkat partisipasi pada tahapan program pembangunan dapat dianalisa secara teknik dan diukur tingkat partisipasinya. Perumusan tingkat partisipasi menurut teori Arnstein (1969), Nabeel Hamdi dan Reinhard Goether (1997:66) sebagai bantuan untuk menguji alat dan teknik, tahapan tentang proyek atau program dihubungkan dalam matriks dan pada ketelitian tingkat partisipasi. Tingkat atau derajad partisipasi, mulai dari partisipasi tidak langsung sampai dengan tahap pengendalian penuh oleh masyarakat. Tingkat partisipasi pengelolaan bantuan keuangan pembangunan jalan poros desa berdasarkan 2 (dua) teori tersebut dapat diklasifikasikan dan dirumuskan menjadi 3 (tiga) tingkat, yakni: tingkat partisipasi tinggi, sedang, dan rendah.

HASIL ANALISA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA DI KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

Berdasarkan hasil analisa bentuk partisipasi masyarakat, analisis tingkat partisipasi masyarakat, analisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat, serta analisis pengaruh lokasi terhadap partisipasi masyarakat pada pembangunan jalan poros desa di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, baik itu di desa dengan jarak lokasi pembangunannya jauh dengan pemukiman atau berjarak lebih dari 1000 meter yakni Desa Wotan dan Desa Ketanen, maupun desa dengan jarak lokasi pembangunannya dekat dengan pemukiman atau berjarak kurang dari 1000 meter yakni Desa Siwalan, Desa Dalegan dan Desa Sukodono, maka dapat diperoleh kesimpulan partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan poros desa sebagai berikut ini.

Bentuk Partisipasi Masyarakat Tahap Perencanaan

Pada Desa Wotan dan Ketanen yang masuk kategori desa dengan lokasi pembangunan jauh dari pemukiman, bentuk partisipasi masyarakat dalam kategori pengendalian terbagi (*shared control*). Masyarakat hanya dominan pada kerelaan warga untuk hadir dalam pertemuan membahas perencanaan. Bentuk usulan proposal diserahkan atau mempercayakan

sepenuhnya pada pemberi program. Pada Desa Sukodono, Dalegan, dan Siwalan yang masuk kategori desa dengan lokasi pembangunannya dekat dari pemukiman, bentuk partisipasi masyarakat masuk dalam kategori pengendalian penuh. Bentuk partisipasi yang dominan pada tahap perencanaan berupa tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan cukup tinggi. Diwujudkan dengan bantuan desain, usulan proposal, dan rancangan perencanaan tahap demi tahap yang sudah lengkap.

Bentuk Partisipasi Masyarakat Tahap Pelaksanaan

Pada Desa Wotan dan Ketanen yang masuk kategori desa dengan lokasi pembangunannya jauh dari pemukiman, bentuk partisipasi masyarakat tahap ini masuk dalam kategori pengendalian terbagi. Bentuk partisipasi yang dominan pada tahap pelaksanaan berupa bantuan pikiran dalam pelaksanaan yang cukup besar. Diwujudkan dengan tingkat kehadiran warga dalam pertemuan membahas evaluasi pelaksanaan dan banyaknya usulan, serta masukan yang cukup tinggi dalam memberikan input perbaikan. Dalam hal bentuk partisipasi sumbangan tenaga masih dilakukan dengan kerjasama pihak luar. Pada Desa Sukodono, Dalegan, dan Siwalan yang masuk kategori desa dengan lokasi pembangunan dekat dari pemukiman, bentuk partisipasi masyarakat masuk dalam kategori pengendalian penuh. Bentuk partisipasi yang dominan pada tahap pelaksanaan berupa sumbangan tenaga, pikiran, dana, dan barang yang cukup tinggi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan cukup tinggi. Diwujudkan dengan banyaknya masukan dan usulan dalam evaluasi pelaksanaan. Pada tahapan pembangunan konstruksi jalan sebagian besar Desa Sukodono, Siwalan, dan Dalegan menggunakan tenaga kerja setempat. Sumbangan swadaya material barang ataupun dana cukup tinggi. Masyarakat digilir bergantian untuk memberikan makanan dan minuman untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan. Dengan metode seperti ini, swadaya dana yang terkumpul digunakan untuk menambah volume jalan, pada akhirnya volume pengerjaannya menjadi lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan.

Bentuk Partisipasi Masyarakat Tahap Pemeliharaan

Pada Desa Wotan dan Ketanen yang masuk kategori desa dengan lokasi pembangunannya jauh dari pemukiman, bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kurang. Hal tersebut dikarenakan lokasi pembangunan yang jauh dari pemukiman, sehingga mengakibatkan kurang terkontrolnya perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan jalan. Kegiatan pemeliharaan jalan bukan menjadi urutan prioritas utama, mereka lebih mendahulukan prasarana dan sarana yang ada dekat dengan lingkungannya. Pada Desa Sukodono, Dalegan, dan Siwalan yang masuk kategori desa dengan lokasi pembangunannya dekat dari pemukiman, bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sangat dominan. Karena lokasi jalan di sekitar lingkungannya, maka kerusakan pada titik-titik tertentu segera diperbaiki, dengan inisiatif penduduk didekat lokasi kerusakan maupun diselenggarakannya kerja bakti. Kegiatan pertemuan rutin membahas pemeliharaan sarana/prasarana desa oleh warga yang diselenggarakan tiap bulannya selalu menempatkan pemeliharaan jalan termasuk sebagai alternatif utama.

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan

Pada Desa Wotan dan Ketanen yang masuk kategori desa dengan lokasi pembangunannya jauh dari pemukiman, tingkat partisipasi masyarakat pada tahap ini dimulai pada saat penyusunan proposal pembangunan dan termasuk tingkat partisipasi sedang, ditandai dengan adanya bentuk kerjasama antara Panitia Pembangunan dengan pihak Perencana dan Tim Kabupaten. Pada awal pembuatan proposal, pihak desa mengusulkan rencana anggaran biaya serta desain dan lokasi yang akan dibangun. Setelah usulan proposal disetujui, tim kabupaten menverifikasi hasil perencanaan dan menghasilkan desain rampung yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan terlebih dahulu hasilnya disetujui oleh kepala desa selaku

penanggung jawab kegiatan. Setelah desain perencanaan selesai, maka Panitia Pembangunan melakukan pekerjaan persiapan dengan mempelajari detail rencana pekerjaan yang telah ada dengan tetap berkoordinasi dengan Tim Kecamatan dan Kabupaten. Dalam prosesnya Panitia Pembangunan melakukan pertemuan dengan masyarakat membahas perencanaan tersebut, dalam melakukan rembug bersama ternyata antusias dan frekuensi kehadiran warga tidak begitu dominan. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran warga yang kurang, disebabkan rencana jalan yang dibangun jauh dari prediksi yang mereka inginkan.

Pada Desa Sukodono, Dalegan, dan Siwalan yang masuk kategori desa dengan lokasi pembangunannya dekat dari pemukiman, tingkat partisipasi masyarakat pada tahapan ini dimulai pada saat penyusunan proposal pembangunan termasuk tingkat partisipasi tinggi. Pada tahap ini terjadi kerjasama antara Panitia Pembangunan dengan pihak perencana dan Tim Kabupaten. Pada awal pembuatan proposal, pihak desa mengusulkan rencana anggaran biaya dan desain termasuk lokasi yang akan dibangun. Pada saat usulan proposal disetujui, maka disaat inilah tim kabupaten menverifikasi hasil perencanaan dan merencanakan ulang rencana anggaran biaya dan desain serta menentukan lokasi kegiatannya dengan disetujui oleh kepala desa selaku penanggung jawab kegiatan. Setelah desain perencanaan dari Tim Kabupaten selesai, maka Panitia Pembangunan Desa melakukan pekerjaan persiapan dengan mempelajari detail rencana pekerjaan yang telah ada dengan tetap berkoordinasi dengan Tim Kecamatan dan Kabupaten. Dalam prosesnya Panitia Pembangunan Desa melakukan pertemuan dengan masyarakat membahas perencanaan, dalam melakukan rembug bersama ternyata antusias dan frekuensi kehadiran warga cukup baik. Diwujudkan dengan tingkat kehadiran dan keterlibatan warga dalam membahas perencanaan pembangunan yang relatif tinggi.

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pelaksanaan

Pada Desa Wotan dan Ketanen yang masuk kategori desa dengan lokasi pembangunannya jauh dari pemukiman, tingkat partisipasinya sedang. Pada saat persiapan pelaksanaan terjadi kerjasama antara panitia pembangunan dengan tim teknis pembangunan. Pada tahap ini merupakan tahap evaluasi dan mempelajari kesiapan dokumen. Pada Desa Sukodono, Dalegan, dan Siwalan yang masuk kategori desa-desa dengan lokasi pembangunannya dekat dari pemukiman, tingkat partisipasi tinggi. Dimana masyarakat mempunyai kekuasaan dan mendominasi kegiatan yang dilakukan. Pemberian kekuasaan ini menyangkut teknis dan administrasi yang akan dilakukan pada tahap pelaksanaan yang dibahas bersama oleh tim teknis, panitia pembangunan, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam perekrutan tenaga kerja, pengadaan material dan peralatan masyarakat memiliki wewenang penuh didalam suatu kegiatan. Tim pengawas hanya mendampingi dan memastikan jalannya kegiatan sesuai dengan pedoman teknis yang diberikan. Penempatan dan perekrutan tenaga masyarakat dilakukan oleh panitia pembangunan desa berdasarkan keahliannya masing-masing. Pada saat pelaksanaan pekerjaan, kegiatan evaluasi dilaksanakan rutin setiap minggunya melalui laporan harian-mingguan. Pengawasan dan pengendalian pekerjaan dilakukan dengan tingkat partisipasi tinggi, masyarakat bersama-sama melakukan pengawasan terhadap mutu pekerjaan, mutu material dan bahan.

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pemeliharaan

Pada Desa Wotan dan Ketanen yang masuk kategori desa dengan lokasi pembangunannya jauh dari pemukiman, tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pemeliharaan kurang. Hal tersebut dikarenakan lokasi pembangunan yang jauh dari pemukiman, sehingga tidak dapat memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada untuk perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan jalan. Pada Desa Sukodono, Dalegan, dan Siwalan yang masuk kategori desa dengan lokasi pembangunannya dekat dari pemukiman, tingkat partisipasi masyarakat dalam

pemeliharaan tinggi. Karena lokasi jalan di sekitar lingkungannya maka kerusakan pada titik-titik tertentu segera diperbaiki. Terbukti tersedianya dan dialokasikannya dana dalam perbaikan dan pemeliharaan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BENTUK DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT

Pada desa dengan jarak lokasi pembangunannya jauh dari pemukiman memiliki bentuk partisipasi pengendalian terbagi (*shared control*) dan tingkat partisipasi sedang. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada kategori ini antara lain a) Besarnya keingintahuan warga mengenai bentuk perencanaan jalan yang akan dibangun; b) Pada Desa Ketanen mendapatkan bantuan berupa jenis konstruksi yang sulit dan berat, yakni jenis jalan batu (*telford*). Pada jenis konstruksi ini selain butuh keahlian khusus hasilnya juga kurang menarik jika dibandingkan konstruksi paving maupun aspal, sehingga mengurangi minat dan ketertarikan warga dalam berpartisipasi; c) Jarak lokasi yang jauh dari pemukiman sehingga sebagian masyarakat cenderung memilih mendatangkan tenaga dari luar dalam pelaksanaan pembangunan; d) Lokasi jalan yang jauh dari pemukiman, sehingga mengakibatkan kurang terkontrolnya perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan jalan dan kurangnya pemanfaatan terhadap sumber daya yang ada dalam pemeliharaan; e) Lokasi pembangunan tidak sesuai dengan harapan aspirasi keinginan sebagian besar warga masyarakat; f) Medan yang lebih sulit dan membutuhkan biaya pengelolaan yang lebih banyak dalam pembangunannya; g) Lokasi yang jauh berhubungan dengan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan, hal ini lain dibandingkan dengan lokasi kegiatan yang dekat dengan pemukiman, saat pelaksanaannya seluruh warga masyarakat melihat dan mengawasi secara langsung secara terus-menerus (*continue*); h) Kurangnya tenaga ahli yang berpengalaman menyebabkan sulitnya mengejar mutu pekerjaan yang dipersyaratkan. Upaya mencapai mutu kualitas untuk lokasi yang jauh dari pemukiman dirasakan lebih berat, karena kondisi stabilitas tanah dasar lebih buruk dan labil.

Pada desa dengan jarak lokasi pembangunannya dekat dari pemukiman, dalam kategori ini memiliki bentuk partisipasi pengendalian penuh dan tingkat partisipasi tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat kategori ini antara lain a) Besarnya keingintahuan warga mengenai bentuk perencanaan jalan yang akan dibangun; b) Pada Desa Dalegan mendapatkan bantuan berupa jenis konstruksi yang mudah, yakni jenis jalan *paving stone*. Pada jenis konstruksi ini selain mudah pembangunannya hasilnya juga menarik, sehingga menambah minat dan ketertarikan warga dalam berpartisipasi; c) Jarak lokasi yang dekat dari pemukiman sehingga sebagian masyarakat berlomba-lomba terlibat dalam pelaksanaan pembangunan; d) Lokasi jalan yang dekat dari pemukiman, sehingga mudah dalam perawatan. Kerusakan jalan yang timbul segera terdeteksi dan terkontrol serta segera dilakukan perbaikan; e) Lokasi jalan yang dekat dengan pemukiman lebih memungkinkan optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang ada; f) Lokasi pembangunan sesuai dengan harapan aspirasi warga masyarakat; g) Medan yang lebih stabil dan membutuhkan biaya pengelolaan yang lebih ringan dalam pembangunan; h) Lokasi yang dekat berhubungan dengan mudahnya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan, sebagian besar warga masyarakat dapat melihat dan mengawasi secara langsung dan *continue*; i) Kurangnya tenaga ahli yang berpengalaman tertutupi dengan besarnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Upaya mencapai mutu kualitas untuk lokasi yang dekat dari pemukiman dirasakan lebih ringan, karena kondisi stabilitas tanah dasar lebih stabil.

KESIMPULAN

Pada desa dengan lokasi pembangunannya jauh dari pemukiman memiliki bentuk partisipasi pengendalian terbagi (*shared control*). Bentuk usulan proposal diserahkan atau mempercayakan sepenuhnya pada pemberi program. Bentuk partisipasi sumbangan tenaga masih dilakukan dengan kerjasama pihak luar, terbukti dengan banyaknya penggunaan tenaga kerja dari luar. Pada desa dengan lokasi pembangunannya dekat dengan pemukiman memiliki bentuk partisipasi pengendalian penuh (*full control*). Bentuk partisipasi yang dominan pada tahap perencanaan berupa tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan cukup tinggi. Bentuk partisipasi yang dominan pada tahap pelaksanaan berupa sumbangan tenaga, pikiran, dana, dan material. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan ini cukup tinggi. Pada tahapan pembangunan konstruksi jalan, sebagian besar menggunakan tenaga kerja setempat. Tingkat partisipasi kategori desa yang jarak lokasi pembangunannya jauh dari pemukiman mencapai tingkat sedang, hal ini dikarenakan keterlibatan warga dalam mengelola dana pembangunan jalan poros desa masih harus diawasi dan bekerjasama dengan didampingi oleh lembaga desa dan pemerintah.

Pada Desa Sukodono, Dalegan, dan Siwalan yang masuk kategori desa dengan lokasi pembangunannya dekat dari pemukiman, tingkat partisipasi mencapai tingkat tinggi. Hal ini didukung dengan keterlibatan yang tinggi dari seluruh masyarakat dalam pengelolaan dana pembangunan Jalan Poros Desa, dimulai pada tahap perencanaan, mulai dari penyusunan proposal pengajuan dana sampai pembuatan perencanaan teknis dibahas secara bersama pada pertemuan warga dan pada tahap pembangunan dan pemeliharaan/perbaikan jalan dilaksanakan dengan swakelola. Melalui analisa program SPSS tabulasi silang, berdasarkan hasil survei data kuesioner di 5 desa menunjukkan hasil bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan poros desa tergantung dengan jarak lokasi pembangunannya dari pemukimannya. Jarak lokasi pembangunan yang dekat dengan pemukimannya menghasilkan tingkat partisipasi yang tinggi. Sedangkan sebaliknya jarak lokasi yang jauh menunjukkan tingkat partisipasi sedang.

Dengan melihat bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan poros desa, maka alokasi bantuan pembangunan jalan poros desa untuk desa dengan lokasi pembangunannya dekat dengan pemukiman pada tahun-tahun berikutnya lebih tepat dan layak diberikan dan nilainya ditambah. Hal ini dengan pertimbangan antara lain a) Tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat yang relatif tinggi; b) Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dimulai dari penyusunan proposal, kebutuhan prioritas warga, pelaksanaan hingga pemeliharaan yang cukup dominan; c) Kondisi jalan poros desa untuk lokasi dekat pemukiman yang masih belum mantap/jalan tanah, sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat; d) Penggunaan tenaga kerja masyarakat yang lebih dominan dan padat karya. Alokasi bantuan pembangunan jalan poros desa untuk desa dengan lokasi pembangunannya jauh dengan pemukiman pada tahun-tahun berikutnya lebih tepat dan layak untuk dikendalikan, diawasi, dan dimonitoring. Hal ini dengan pertimbangan a) Tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat yang tergolong sedang; b) Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dimulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan, hingga pemeliharaan masuk dalam kategori partisipasi sedang. Masyarakat masih memerlukan kerjasama dengan pemberi program; c) Kondisi jalan poros desa untuk jarak lokasi pembangunannya jauh dengan pemukiman banyak yang belum mantap/jalan tanah, sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat desa; d) Minimnya penggunaan tenaga kerja setempat, masyarakat lebih memilih penggunaan tenaga luar untuk lokasi kegiatan yang jauh dari pemukimannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arnstein, Sherry R. 1995. *A Ladder of Citizen Participation* dalam Jay M. Stein (ed). *Classic Reading in Urban Planning : an Introduction*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Burke, Edmund M. 2004. *Sebuah Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Kota*. Terjemahan Puji Lestari, dkk. Bandung: Yayasan Sugijanto Soegijoko.
- Hamdi, Nabeel dan Reinhard Goethert. 1997. *Action Planning For Cities, A Guide to Community Practice*. England: John Wiley & Soons.
- Karianga, Hendra. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Alumni.
- Muhadjir, Noeng. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Telaahan Positivistik Rasionalistik dan Phenomenologik*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Bagian Administrasi Pembangunan. 2011. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Jalan Poros Desa*.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Jakarta: Kanisius.